



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip merupakan sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  11. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.  
Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
8. Arsip Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
9. Arsip Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
10. Arsip Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
11. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
12. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
13. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
14. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
15. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
16. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
18. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan informasi arsip yang bersifat rahasia.

Pasal 4

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB III  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;

- b. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
  - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
  - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas dengan pola, sebagai berikut:
- a. 000 Umum ;
  - b. 100 Pemerintahan ;
  - c. 200 Politik ;
  - d. 300 Keamanan dan Ketertiban ;
  - e. 400 Kesejahteraan ;
  - f. 500 Perekonomian ;
  - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan ;
  - h. 700 Pengawasan ;
  - i. 800 Kepegawaian ; dan
  - j. 900 Keuangan.

BAB III  
PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
  - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
  - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, Antara lain sebagai berikut :
  - a. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/Instansi yang berada di bawah kewenangannya; pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
  - b. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
  - c. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, Arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya; dan
  - d. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah pengguna dari lingkungan eksternal (luar) instansi terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa / terbuka;
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
  - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

#### Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis dan diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Lampiran I Kode Angka 000 Bidang Tugas Umum;
- b. Lampiran II Kode Angka 100 Bidang Tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III Kode Angka 200 Bidang Tugas Politik;
- d. Lampiran IV Kode Angka 300 Bidang Tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. Lampiran V Kode Angka 400 Bidang Tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI Kode Angka 500 Bidang Tugas Perekonomian;
- g. Lampiran VII Kode Angka 600 Bidang Tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII Kode Angka 700 Bidang Tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX Kode Angka 800 Bidang Tugas Kepegawaian; dan
- j. Lampiran X Kode Angka 900 Bidang Tugas Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan diantaranya pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. katagori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
  - b. katagori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
  - c. katagori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.

- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 22

Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 000 Bidang Tugas Umum

<b>I. Umum</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	000	UMUM				
	001	Lambang - Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota/Kabupaten	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	002	Penghargaan - Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	
	003	Hari Raya/ Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll - Hari Ulang Tahun ( HUT )	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	004	Ucapan - Ucapan Terima kasih - Ucapan Selamat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

		- Ucapan Belasungkawa - Ucapan lainnya			mengganggu kinerja	
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas - Tanah untuk rumah dinas - Perabotan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	013	Mess/ Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
	016	Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	019	Protokol - Upacara Bendera - Tata tempat - Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Sambutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
3	020	PERALATAN -Penawaran, Ekspose	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis .

					mengganggu kinerja	
	023	Pejabat Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI				
	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi -Foto - Audio - Video	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas - Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan/perawatan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi - Peralatan -Sistem -Sumber Daya Manusia -Pembinaan Persandian	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN - REPELITA - Pelita Daerah - Bantuan Pembangunan Daerah - Bappeda - Perencanaan/ Proyek bidang peralatan - Bidang Perpustakaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag.

		- Bidang Kearsipan - Bidang Sandi - Organisasi/ Ketatalaksanaan - Penelitian			perangkat daerah unit kerja	
051	Bidang Pemerintahan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
052	Bidang Politik		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
053	Bidang Keamanan Ketertiban		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
055	Bidang Perekonomian		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
056	Bidang Pekerjaan Umum		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
057	Bidang Penmgawasan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi pemerintah - Sususnan dan tata kerja - Tata tertib Kantor, jam kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatakasnaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	075	Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
	076	Non Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten / Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	080	KONFRENSI				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati /Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen Eselon Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi ( Pejabat Eselon I )	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk Pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
099	Perjanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran II Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim  
 Kode Angka 100 Bidang Tugas Pemerintahan

<b>II. PEMERINTAHAN</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	130	<b>PEMERINTAH KABUPATEN</b>				
	131	Bupati Meliputi				
		Pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentiaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Serah Terima Jabatan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
		Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Meninggal	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Memori Kepala Daerah	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan / Pengarahan / Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
132		Wakil Bupati Meliputi				
		Pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pemberhentiaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Serah Terima Jabatan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
133		Sekretaris Daerah Kabupaten Meliputi				
		Pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentiaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Meninggal	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
	134	Forum Komunikasi Pemerintah di Daerah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Muspida	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Koordinasi Lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerja Sama antar Kabupaten / Kota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	135	Pembentukan / Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah Jalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/ Pengarahan / Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
		Pembentukan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	139	Laporan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>2</b>	140	<b>PEMERINTAH DESA / KELURAHAN</b>				

141	Pamong Desa, meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
143	Kekayaan Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
144	Dewan Tingkat Desa / Kelurahan, Dewan marga, Rembung Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
145	Administrasi desa / Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
146	Kewilayahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Mmiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerja sama antar Desa / Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan perinciannya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kepala Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Rukun Tetangga	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	170	<b>DPRD KABUPATEN / KOTA</b>				
		Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
		Pergantian Antar waktu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan - Reses	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten / Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	<b>HUKUM</b>				

		Konsitusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang-undang Dasar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Garis Besar Haluan negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rumah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Utang / Piutang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Gadai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Hipotik	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Notariat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	183	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Bantuan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	184	Hukum Inrenational	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	<b>185</b>	Imigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Visa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pasprt	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Exit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Reentry	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Lintas batas / Batas Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	186	Rumah Tahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

187	Kejaksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Peraturan Kabupaten / Kota	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Keputusan Bupati / Walikota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
197	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran III Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 200 Bidang Tugas Politik

<b>III. POLITIK</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	200	POLITIK				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Umum</li> <li>- Orde Baru</li> <li>- Reformasi</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210	KEPARTAIAN Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian,dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah unit kerja	
		Lambang Partai Kartu Tanda Anggota Anggaran dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		Bantuan Keuangan Parpol Rapat Koordinasi Konsolidasi Partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	Berdasarkan Perjuangan Berkas tentang perjuangan perintis kemerdekaan Berkas tentang perjuangan angkatan 45 Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah unit kerja	
222	Berdasarkan Kekaryaannya Kekaryaannya Pepabri Kekaryaannya Wredatama		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
223	Berdasarkan Kerohanian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
224	Lembaga Adat		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

3	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	231	IkatanIkatan Dokter Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	232	Persatuan Guru Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
234	Persatuan Advokat Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
<b>235</b>	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
236	Korps Pegawai Republik Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
237	Persatuan Wartawan Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
238	Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI)		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
239	Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah unit kerja	
	240	ORGANISASI PEMUDA	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	241	Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah unit kerja	
	243	Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	244	Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN				
	251	Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah unit kerja	
	252	Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	254	Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	255	Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	260	ORGANISASI WANITA				
	261	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	262	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	263	Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	264	Kongres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	265	Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
272	Nomor Urut Partai / Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
273	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Me miliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang Teknis	

					fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
275	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
276	Sarana Sarana TPS Sarana Kendaraan Surat Suara Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
277	Pemungutan Suara / Perhitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

					perangkat daerah unit kerja	
	278	Pengambilan Sumpah/Janji anggota MPR.DPR.DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	280	PILKADA				
	281	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	282	Nomor Urut Partai/Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah unit kerja	
	283	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	284	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	285	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	286	Sarana Sarana TPS Sarana Kendaraan Surat Suara Kotak Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	287	Pemungutan Suara / Perhitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	288	Penambilan sumpah/janji anggota MPR.DPR.DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	290	KOMISI PEMILIHAN UMUM / BAWASLU				

	291	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
--	-----	----------	----------	------------	--	---------------

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran IV Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 300 Bidang Tugas Keamanan dan Ketertiban

<b>IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	300	KEAMANAN / KETERTIBAN				
	301	Polis Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	303	PSK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	304	GEPENG	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	PPNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan	Bidang Teknis

					Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
	312	Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	313	Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	314	Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis

	322	Wajib Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	323	Oprasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	324	Kekayaan ABRI / TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	325	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di	Bidang Teknis

					lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
332	Huru hara / Demontrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis	
333	Senjata api / senjata tajam	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis	
334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis	
335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis	

					daerah unit kerja	
	336	Surat-surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	338	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
		Perlindungan Masyarakat ( Linmas )	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
6	350	KEJAHATAN				
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, Pencurian dan Perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	354	Subversi/ Penyelundupan / Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis

					Kabupaten Muara Enim	
	355	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	357	Pemeriksaan / Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis

	359	Kejahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	Gunung berapi / Gempa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / Tanah Longsor	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	Angin Topan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan</li> <li>- Penanggulangan</li> <li>- Pencegahan</li> <li>- Pemadaman</li> <li>- Pengujian Instalasi</li> <li>- Antisipasi</li> <li>- Proteksi, APAR</li> <li>- Kebutuhan Sarpas</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
8	370	KECELAKAAN SAR				
	371	Darat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	Udara	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	Sungai / Danau	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran V Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 400 Bidang Tugas Kesejahteraan

<b>V. KESEJAHTRAAN RAKYAT</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	400	KESEJAHTRAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	
	404	Askeskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	405	Jamkessos / Jamkesda	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
		a.Swadaya Gotong Royong 1) Penataan Gotong Royong 2) Gotong Royong Dinamis 3) Gotong Royong statis 4) Pungutan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b.Lembaga Sosial Desa 1) Pembinaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

		2) Klasifikasi 3) Proyek 4) Musyawarah Desa			kinerja OPD / Unit kerja	
		c. Latihan Kerja Masyarakat 1) Kader Masyarakat 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3) Pusat Latihan 4) Kursus-kursus 5) Kurikulum / Syllabus 6) Keterampilan 7) Oramuka	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1) Program 2) Pembinaan Organisasi 3) Kegiatan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		g. Penyuluhan 1) Publikasi 2) Peragaan 3) Sosio Drama 4) Siaran Pedesaan 5) Penyuluhan Lapangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		h. Kelembagaan Desa 1) Kelompok Tani 2) Rukun Tani	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
412		PEREKONOMIAN DESA				
		a. Produksi Desa 1) Pengolahan 2) Pemasaran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b. Keuangan Desa 1) Perkreditan desa 2) Inventarisasi data 3) Perkembangan / Pelaksanaan 4) Bantuan / Stimulus 5) Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c. Koprasi Desa 1) Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 2) Koprasi Unit Desa (KUD)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d. Penataan Bantuan Pembangunan Desa 1) Jumlah desa yang diberi bantuan 2) Pengarahan 3) Pusat 4) Daerah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e. Alokasi Bantuan Pembangunan Desa 1) Pusat 2) Daerah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		f. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa 1) Bantuan Langsung 2) Bantuan Keserasian 3) Bantuan Juara Lomba Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		g. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Berkas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	413	PRASARANA DESA				
		a. Prasarana Desa 1) Pembinaan 2) Bimbingan Teknis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b. Pemukiman Kembali Penduduk 1) Lokasi 2) Diskusi 3) Pelaksanaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c. Masyarakat Pradesa 1) Pembinaan 2) Penyuluhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1) Rumah Sehat 2) Proyek Perintis 3) Pelaksanaan 4) Pengembangan 5) Perbaikan Kampung	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

414	PENGEMBANGAN DESA				
	a. Tingkat perkembangan Desa 1) Jumlah desa 2) Pemekaran desa 3) Pembentukan desa baru 4) Evaluasi 5) Bagan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	b. Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) 1) Penyuluhan program 2) Lokasi UDKP 3) Pelaksanaan 4) Bimbingan / pembinaan 5) Evaluasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	c. Tata Desa 1) Inventarisasi 2) Penyusunan pola tata desa 3) Pemetaan 4) Pedoman pelaksanaan 5) evaluasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	d. Perlombaan Desa 1) Pedoman 2) Penilaian 3) Kejuaraan 4) Piagam	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
415	KOORDINASI				
	a. Sektor Khusus Berkas tentang koordinasi sector khusus di Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		b.Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) Berkas tentang rapat kordinasi horizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Tim Koordinasi Pusat (TKP) Berkas tentang tim koordinasi pusat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d.Kerjasama 1) Luar Negeri (UNICEF) 2) Perguruan Tinggi 3) Departemen / Lembaga non Departemen	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
3	420	PENDIDIKAN				
	421	SEKOLAH				
		a.Pra Sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b.Sekolah Dasar / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Sekolah Menengah / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		d.Sekolah Kejuruan / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e.Sekolah Tinggi / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		f.Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		g.Kegiatan Pelajar 1) Reuni,darmawisata 2) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 3) Pelajar Teladan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		h.Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		i. Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
422		ADMINISTRASI SEKOLAH				

		a.Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Pengenalan Sekoal	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b.Tahun Pelajaran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Hari Libur	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d.Uang Sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e.Bea Siswa)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		f.Biaya Oprasional Sekolah (BOS)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
423		METODE BELAJAR				

		a.Kuliah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b.Ceramah, Simposium	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Diskusi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d.Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Sudi Tour	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e.Kurikulum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		f.Karya Tulis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		g.Ujian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	
424	TENAGA PENGAJAR					
	Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector dan guru teladan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
425	SARANA PENDIDIKAN					
	a.Gedung 1) Gedung Sekolah 2) Kampus 3) Pusat Kegiatan Mahasiswa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	b.Buku Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	c.Perengkapan Sekolah Berkas tentang perlengkapan sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
426	KEOLAHRAGAAN					
	a.Cabang Olah Raga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	

		b.Sarana 1) Gedung Olah Raga 2) Stadion 3) Lapangan 4) Kolam Renang	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Pesta Olah Raga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d.KONI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
427		KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
428		KEPRAMUKAAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
429		PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDAGRI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
430		KEBUDAYAAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	
431	KESENIAN					
	a.Cabang kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	b.Sarana Berkas tentang Gedung Kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
432	KEPURBAKALAN					
	a.Museum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	b.peninggalan Kuno 1) Candi termasuk pemugaran 2) Benda peninggalan kuno	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
433	SEJARAH	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
434	BAHASA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis	

					mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	
	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	436	KEPERCAYAAN Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441	PEMBINAAN KESEHATAN a) .Gizi b) Mata c) Jiwa d) Kanker e) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) f) Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) g) Pekan Imunisasi Nasional	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	442	OBAT-OBATAN a) Pengadaan b) Penyimpanan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	443	PENYAKIT MENULAR				
		a.Pencegahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja OPD / Unit kerja	
		<p>b.Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kusta</li> <li>2) Kelamin</li> <li>3) Frambosia</li> <li>4) TBC/AIDS/HIV</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		<p>C,Epidemilogi dan Karantina (Epidka)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kholera</li> <li>2) Imunisasi</li> <li>3) Survailense</li> <li>4) Rabies/Anjing Gila. Antraks</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		<p>d.Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Malaria</li> <li>2) Dengue Faemorrhagic Fever ( Demam Berdarah HDF)</li> <li>3) Filaria</li> <li>4) Serangga</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		<p>e.Hygiene Sanitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan makanan dan minuman (TPPMM)</li> <li>2) Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga)</li> <li>3) Pestisida</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	444	<p>GIZI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.Kekurangan Makanan</li> <li>b.Bahaya Kelaparan</li> <li>c. Busung Lapar</li> <li>c.Keracunan Makanan</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

		d.Menu makanan Rakyat e.Badan Perbaikan Gizi Daerah ((BPGD) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)			tugas OPD/Unit kerja	
	445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	446	TENAGA MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	447	ALAT MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	448	PENGOBATAN TRADISIONAL a.Pijat b.Tusuk Jarum c.Jamu Tradisional / Herbal d.Dukun / Paranormal	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
6	450	AGAMA				
	451	ISLAM				
		a.Peribadatan 1) Sholat 2) Zkat Fitrah 3) Puasa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		4) MTQ				
		b.Rumah Ibadah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Tokoh Agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d.Pendidikan 1) Tinggi 2) Menengah 3) Dasar 4) Pondok Pesantren 5) Gedung Sekolah 6) Tenaga Pengajar 7) Buku 8) Dakwah 9) Organisasi / Lembaga Pendidikan 10)TPA /TQA /TPQ	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e.Tokoh Agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		f.Peradilan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja OPD / Unit kerja	
		g. Organisasi Keagamaan Bukan Politk Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia	a.Peribadatan	a.Peribadatan	a.Peribadatan	a.Peribadatan
		h.Mazhab	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
452		KRISTEN PROTESTAN a.Peribadatan b.Rumah Ibadah c.Tokoh Agama, Rohaniawan d.Pendeta, Somine e.Mazhab, Organisasi Gerejani	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
453		KATHOLIK a.Peribadatan b.Rumah Ibadah c.Tokoh Agama, Rohaniawan d.Pastor e.Mazhab, Organisasi Gerejani	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
454		HINDU a.Peribadatan b.Rumah Ibadah c.Tokoh Agama, Rohaniawan d.Mazhab e.Organisasi Keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
455		BUDHA a.Peribadatan b.Rumah Ibadah c.Tokoh Agama, Rohaniawan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

		d.Mazhab e.Organisasi Keagamaan			kinerja OPD / Unit kerja	
456		URUSAN HAJI a.ONH b.Umroh c.Manasik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
460		SOSIAL				
461		REHABILITASI PENDERITA CACAT a.Cacat Mata b.Cacat Tubuh c.Cacat Mental d.Bisu Tuli	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
462		TUNA SOSIAL a.Gelandangan b.Pengemis c.Tuna Susila d.Anak Nakal / Anak jalanan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
463		KESEJAHTRAAN ANAK / KELUARGA a.Anak Puts Sekola b.Ibu Teladan c.Keluarga Sakinah d.Anak Asuh	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
464		PEMBINAAN PAHLAWAN a.Pahlawan b.Perintis Kemerdekaan c.Cacat Veteran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
465		KESEJAHTRAAN SOSIAL a. Lanjut Usia b. Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja OPD / Unit kerja	
466	SUMBANGAN SOSIAL a.Korban Bencana b.Pencarian Dana Untuk Korban c.Sumbangan d.Panti Asuhan, Panti Jompo	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
467	BIMBINGAN SOSIAL Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman untuk masyarakat suku terasing	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
468	PMI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
469	MAKAM a.Umum b.Pahlawan c.Krematorium	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
470	KEPENDUDUKAN PENDAFTARAN PENDUDUK					
	a. Identitas Penduduk 1) Biodata 2) Nomor Induk Kependudukan 3) Kartu Tanda Penduduk 4) Kartu Keluarga 5) Advokasi Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	

	<p>b. Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perpindahan Penduduk WNI</li> <li>2) Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah Indonesia</li> <li>3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara</li> <li>4) Daerah terbelakang</li> <li>5) Bedol Desa</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	<p>c. Perpindahan Penduduk Antar Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penduduk Indonesia ke luar negeri</li> <li>2) Orang asing tinggal sementara</li> <li>3) Orang asing tinggal tetap</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	<p>d. Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akibat bencana alam</li> <li>2) Akibat kerusakan social</li> <li>3) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang</li> <li>4) Pendaftaran penduduk rentan</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
472	PENCATATAN SIPIL				
	<p>a. Kelahiran, Kematian, dan Advokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelahiran</li> <li>2) Kematian</li> <li>3) Advokasi kalahiran dan kematian</li> <li>4) Perkawinan, perceraian dan Advokasi</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	<p>b. Perkawinan Agama Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkawinan Agama non Islam</li> <li>2) Perceraian Agama Islam</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Perceraian Agama Non Islam</li> <li>4) Advokasi perkawinan dan perceraian</li> </ul>			mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	
		<p>c.Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta perubahan dan pembatalan Akta dan Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengangkatan Anak</li> <li>2) Pengakuan Anak</li> <li>3) Perubahan Akta</li> <li>4) Pembatalan Akta</li> <li>5) Advokasi pengurusan pengangkatan,pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		<p>d.Pencatatan Kewarganegaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Akibat perkawinan</li> <li>2) Akibat kelahiran</li> <li>3) Non perkawinan</li> <li>4) Non kelahiran</li> <li>5) Perubahan WNI ke WNA</li> <li>6) Perubahan WNA ke WNI</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
473		INFORMASI KEPENDUDUKAN				
		<p>a.Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perangkat keras</li> <li>2) Perangkat lunak</li> <li>3) Jaringan komunikasi data</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		<p>b.Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Daerah maju</li> <li>2) Daerah berkembang</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

		3) Daerah terbelakang			kinerja OPD / Unit kerja	
		c.Pengolahan Data Kependudukan 1) Pendaftaran Penduduk 2) Kejadian vital penduduk 3) Penduduk nonregistrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		d.Pelayanan Informasi Kependudukan 1) Media elektronik 2) Media cetak 3) Outlet	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
474		PERKEMBANGAN PENDUDUK				
		a. Pengarahan kuantitas penduduk 1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Mobilitas penduduk 6) Mortalitas penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b.Pengembangan kuantitas penduduk 1) Anak dan Remaja 2) Penduduk usia produktif 3) Penduduk lanjut usia 4) Gender	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c.Penataan persebaran penduduk 1) Migrasi antar wilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

		4) Sementara 5) Migrasi non permanen			kinerja OPD / Unit kerja	
		d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) Pengembangan system perlindungan penduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanan kelembagaan social budaya 4) Partisipasi masyarakat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e. Pengembangan wawasan kependudukan 1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
475		PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
		a. Indikator Kependudukan 1) Perumusan penetapan dan pengembangan indicator kependudukan 2) Pemanfaatan indicator kependudukan 3) Sosialisasi indicator kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b. Proyeksi Penduduk 1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		c. Analisis Dampak Kependudukan 1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		d.Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah 1) Lembaga internasional 2) Lembaga masyarakat dan nirlaba 3) Lembaga Usaha Swasta	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		e.Penyerasian kebijakan lembaga Pemerintah 1) Lembaga Pemerintah 2) Pemerintah Provinsi 3) Pemerintah Kabupaten	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		f.Analisis Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	476	MONITORING	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	477	EVALUASI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	479	KELUARGA BERENCANA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	
9	480	MEDIA MASA				
	481	PENERBITAN 1) Surat Kabar 2) Majalah 3) Buku 4) Penerjemah 5) Buletin 6) Jurnal 7) Kliping	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	482	RADIO 1) RRI 2) Non RRI 3) Radio luar negeri 4) Internet	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	483	TELEVISI 1) TVRI 2) Swasta local. Nasional 3) Luar negeri 4) Televisi Internet	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	484	FILM	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	485	PERS 1) Kewartawanan 2) Wawancara 3) Informasi nasional	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja OPD / Unit kerja	
486	GRAFIKA Berkas tentang grafika / cetak buku	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
487	PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
488	OPERATION ROOM Berkas tentang operation room terkait media masa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
489	HUBUNGAN MASYARAKAT Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media masa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	

BUPATI MUARA ENIM

Dito

AHMAD YANI

Lampiran VI Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 500 Bidang Tugas Perekonomian

VI. PEREKONOMIAN						
No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN • Dewan Stabilisasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	501	PENGADAAN PANGAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	502	PENGADAAN SANDANG	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya (IMB,SIUP,TDP,HO,TDG)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	
2	510	<p>PERDAGANGAN / TATA NIAGA</p> <p>Promosi Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekan Raya</li> <li>- Iklan</li> <li>- Pameran / Ekspo Komersial</li> <li>- Pelelangan</li> <li>- Tera / Timbangan</li> <li>- Ulang / Kalibrasi</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	511	<p>Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sembilan Bahan Pokok</li> <li>- Pasar Tradisional</li> <li>- Pasar Modern</li> <li>- Pertokoan, Kaki Lima, Kios</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	512	EKSPOR	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	513	IMPOR	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
516	PERGUDANGAN;TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORENG	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
518	KOPERASI ( UNTUK BUUD, KUD, KUR )				
520	PERTANIAN				
521	<p>Tanaman Pangan</p> <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimas/Inmas termasuk kredit</li> <li>- Penyuluhan</li> </ul> <p>Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi / Panen</li> <li>- Palawija</li> <li>- Jagung</li> <li>- Ketela Pohon / Ubi-ubian</li> <li>- Hortikultura</li> <li>- Sayuran / Buah-buahan</li> <li>- Tanaman Hias</li> </ul> <p>Perlindungan Tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hama-hama serangga,wereng, Walang Sangit, tungro,hama tikus dan sejenisnya</li> <li>- Pemberantasan hama,meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan,sprayer,pemberantasan melalui udara</li> <li>- Peptisida</li> </ul> <p>Tanah Pertanian Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persawahan</li> <li>- Perladangan</li> <li>- Kebun</li> <li>- KTA / Lahan Kritis</li> </ul> <p>Pengusaha Petani</p> <p>Bina Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasca Panen</li> <li>- Pemasaran Hasil</li> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Rukun Tani</li> </ul>				
522	<p>KEHUTANAN</p> <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Pengusahaan Hutan</li> <li>- Tata Guna Hutan</li> <li>- Perpetaan Hutan</li> <li>- Tumpang Sari</li> </ul> <p>Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu</li> <li>- Non Kayu</li> </ul> <p>Sarana Usaha Kehutanan</p> <p>Penghijauan, Reboisasi</p> <p>Kelestarian</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p> <p>Bidang Teknis</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa</li> <li>- Berburu, meliputi larangan dan izin berburu</li> <li>- Kebun Binatang</li> <li>- Konsevasi Lahan</li> </ul> Penyakit / Hama Jenis-jenis Hutang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hutan Hidup</li> <li>- Hutan Wisata</li> <li>- Hutan Produksi</li> <li>- Hutan Lindung</li> </ul>				
523	PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program</li> <li>- Penyuluhan</li> <li>- Teknologi</li> <li>- Produksi</li> <li>- Pelelangan</li> <li>- Usaha Perikanan</li> <li>- Pembibitan</li> <li>- Daerah Penangkapan</li> <li>- Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain</li> <li>- Sarana</li> <li>- Peralatan</li> <li>- Kapal</li> <li>- Pelabuhan</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
524	PETERNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi</li> <li>- Susu ternak rakyat</li> <li>- Telur</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daging</li> <li>- Kulit</li> <li>- Sarana Usaha Ternak</li> <li>- Pembibitan</li> <li>- Kandang Ternak</li> <li>- Kesehatan Hewan</li> <li>- Penyakit Hewan</li> <li>- Pos Kesehatan Hewan</li> <li>- Tesi Pullorum</li> <li>- Karantina</li> <li>- Pemberantasan Penyakit Hewan, termasuk upaya pencegahannya</li> <li>- Perunggasan</li> <li>- Pengembangan Ternak</li> <li>- Inseminasi Buatan</li> <li>- Pembibitan / Bibit Unggul</li> <li>- Penyebaran Ternak</li> <li>- Makanan Ternak</li> <li>- Tempat Pematangan Hewan</li> <li>- Data Peternakan</li> </ul>			kinerja OPD / Unit kerja	
525	PERKEBUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program</li> <li>- Produksi</li> <li>- Kopi</li> <li>- Karet</li> <li>- Sawit</li> <li>- Teh</li> <li>- Tembakau</li> <li>- Tebu</li> <li>- Cengkeh</li> <li>- Kopra</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		- Coklat - Aneka Tanaman				
4	530	PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	531	Industri Logam	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	532	Industri Mesin / Elektronik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	533	Industri Kimia / Farmasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	534	Industri Tekstil	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan / Minuman	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

	536	Aneka Industri / Perusahaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	537	Aneka Kerajinan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	538	Usaha Negara / BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero / PT, CV,UD,Firma	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	539	Perusahaan Daerah / BUMD	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
5	540	PERTAMBANGAN				
	541	BBM	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	542	Gas Bumi - Eksploitasi / Pengeboran - Kontrak Kerja - Pengolahan Tanki, Pompa Tanker	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

	543	Logam Mulia - Emas - Intan / Batu Mulia - Perak	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	544	Logam - Timah - Aluminium, Boxit - Besi, termasuk besi tua - Tembaga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	545	Aneka Tambang - Batu Bara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	546	Geologi - Vulkanologi - Pengawasan Gunung Berapi - Sumur Artesis, Air Bawah Tanah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	547	Hidrologi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
6	550	PERHUBUNGAN				
	551	Perhubungan Darat - Lalulintas Jalan'Raya, Sungai, Danau - Keamanan Lalulintas, Rambu-rambu - Angkutan Jalan Raya - Perizinan - Alat Angkutan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal</li> <li>- Perkretaapian</li> </ul>				
	552	POS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	553	TELEKOMUNIKASI <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telfon, HP</li> <li>- Telegram</li> <li>- Telex/SSB, Faxmile</li> <li>- Satelit, Internet</li> <li>- Stasiun Bumi, Parabola</li> <li>- Menara Telekomunikasi</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	554	PARIWISATA DAN REKREASI <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek Kepariwisataaan</li> <li>- Perhotelan</li> <li>- Travel Servis</li> <li>- Tempat Rekreasi</li> <li>- Tempat Sejarah / Monumen</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	555	METEOROLOGI <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramalan Cuaca</li> <li>- Curah Hujan</li> <li>- Kemarau Panjang</li> </ul>				
7	560	TENAGA KERJA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganguran</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	
562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI - Outsourcing	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
563	Latihan Kerja, Magang	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
564	Tenaga Sukarela - Butsi - Padat Karya	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
565	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
566	Keselamatan Kerja	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	

	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan,Perumahan,dll)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	569	Tenaga Orang Asing	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
8		PERBANKAN / MONETER				
	570	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah	
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah	
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
9	580	Perbankan / Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah	
583	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
585	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis	

					tugas lembaga daerah	
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
10	590	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah	
591	<p>Tata Guna Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan dan Pengukuran</li> <li>- Perpetaan</li> <li>- Penyediaan Data</li> <li>- Fatwa Tata Guna Tanah</li> <li>- Tanah Kritis</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
592	<p>Landreform</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redistribusi</li> <li>- Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan</li> <li>- Penentuan Tanah Obyek Landreform</li> <li>- Pembagian Tanah Obyek Landreform</li> <li>- Sengketa Redistribusi</li> <li>- Tanah Obyek Landreform</li> <li>- Ganti Rugi</li> <li>- Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputi sengketa ganti rugi tanah kelebihan</li> <li>- Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputi sengketa ganti rugi tanah absentee</li> <li>- Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputi Sengketa ganti rugi tanah partikelir</li> <li>- Bagi Hasil</li> <li>- Penetapan Imbangan Bagi Hasil</li> <li>- Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil</li> <li>- Sengketa Perjanjian Bagi Hasil</li> <li>- Gadai Tanah</li> <li>- Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah</li> <li>- Pelaksanaan Gadai Tanah</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengketa Gadai Tanah</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan</li> <li>- Pengembangan</li> <li>- Yayasan Dana Landreform</li> </ul>				
593		<p>Pengurusan Hak-hak Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis</li> <li>- Sewa Tanah</li> <li>- Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu; Sawit, kopi, teh, tebu, tembakau dll</li> <li>- Hak Milik</li> <li>- Badan Hukum</li> <li>- Hak Pakai</li> <li>- Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI)</li> <li>- Perorangan, Warga Negara Asing (WNA)</li> <li>- Dagang Asing</li> <li>- Tanah Gedung-gedung Negeri</li> <li>- Guna Usaha</li> <li>- Perkebunan Besar</li> <li>- Perkebunan Rakyat</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perikanan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Hak Guna Bangunan</li> <li>- P3MB (Panitia Penguasaan Milik Belanda)</li> <li>- Badan Hukum Asing Belanda-PRK No. 5165</li> <li>- Pemulihan Hak (PerPres 4/1960)</li> <li>- Hak Pengelolaan</li> <li>- PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peradilan Perkara Tanah (Lihat Klasifikasi 183)</li> <li>- Pencabutan dan Pembebasan Tanah</li> <li>- Pencabutan Hak</li> <li>- Pembebasan Tanah</li> <li>- Ganti Rugi Tanah</li> </ul>				
594	Pendaftaran Tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran / Pemetaan</li> <li>- Fotogrametri</li> <li>- Terristis</li> <li>- Triangulasi</li> <li>- Peralatan</li> <li>- Dana Pengukuran (PerMen Agraria No.61 / 1965)</li> <li>- Sertifikat</li> <li>- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)</li> <li>- Ajudikasi</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
595	Lahan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Guna Tanah</li> <li>- Landreform</li> <li>- Pengurusan Hak-hak Tanah</li> <li>- Pendaftaran Tanah</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran VII Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 600 Bidang Tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan

<b>VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
1	601	Tata bangunan Kontruksi, dan Idustri Kontruksi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	602	Kontraktor / Pemborong <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tender / Lelang</li> <li>- Penunjukan Langsung</li> <li>- Prakuualifikasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Rekanan Mampu (DRM)</li> <li>• Tanda Daftar Rekanan (TDR)</li> </ul> </li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah dan Batu</li> <li>- Aspal, Aspal buatan, Aspal alam</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besi dan logam lainnya             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besi beton</li> <li>• Besi profil</li> <li>• Paku</li> <li>• Alumunium, profil</li> </ul> </li> <li>- Bahan-bahan perlindungan dan pengawet</li> <li>- Semen</li> <li>- Kayu seperti balok, papan, dolken</li> <li>- Bahan penutup atap</li> <li>- Alat-alat penggantung dan pengunci</li> <li>- Bahan-bahan bangunan lainnya</li> </ul>			kinerja OPD / Unit kerja	
	605	Instalasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi bangunan</li> <li>- Instalasi Listrik</li> <li>- Instalasi air sanitasi</li> <li>- Instalasi pengatur udara</li> <li>- Instalasi akustik</li> <li>- Instalasi cahaya / penerangan</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	606	Kontruksi Pencegahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap kebakaran</li> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap gempa</li> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap angin udara</li> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap kegaduhan</li> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap gas/explosive</li> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap serangga</li> <li>- Kontruksi pencegahan terhadap radiasi atom</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
2	610	Irigasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan Waduk             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendungan</li> <li>• Tanggul</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelimpahan banjir</li> <li>• Menara pengambilan</li> <li>- Bangunan pengambilan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendungan</li> <li>• Bendungan dengan pintu bilas</li> <li>• Bendungan dengan pompa</li> <li>• Pengambilan bebas</li> <li>• Pengambilan bebas dengan pompa</li> <li>• Sumur dengan pompa</li> <li>• Kantong Lumpur</li> <li>• Siltekstraktor</li> <li>• Escape Channel</li> </ul> </li> <li>- Bangunan Pembawa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran</li> <li>• Bangunan</li> <li>• Box Tersier</li> <li>• Got Miring</li> <li>• Talang</li> <li>• Syphon</li> <li>• Gorong-gorong</li> <li>• Pelimpah samping</li> </ul> </li> <li>- Bangunan Pembuang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran</li> <li>• Bangunan</li> <li>• Gorong-gorong pembuang</li> <li>• Talang pembuang</li> <li>• Syphon pembuang</li> </ul> </li> <li>- Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan</li> <li>• Jembatan</li> </ul> </li> </ul>			pelaksanaan fungsi dan tugas	
--	--	---	--	--	------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tangga cuci</li> <li>• Kubangan kerbau</li> <li>• Waduk lapangan</li> <li>• Bangunan Penunjang</li> <li>• Jaringan tepon</li> </ul> <p>- Stasiun agro</p>				
611	Folder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggul Keliling <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggul</li> <li>• Bangunan penutup sungai</li> <li>• Jembatan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran</li> <li>• Stasiun pompa pemasukan</li> <li>• Bangunan bagi</li> <li>• Gorong-gorong</li> <li>• Syphon</li> </ul> </li> <li>- Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan</li> </ul> </li> <li>- Rumah petugas eksplotasi</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
612	Pasang Surut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran</li> <li>• Bangunan pintu pemasukan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan pembuang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran</li> <li>• Bangunan pintu pembuang</li> </ul> </li> <li>- Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam pasang</li> <li>• Saluran</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan</li> <li>• Jalan</li> </ul>				
613	Pengendalian Sungai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan pengamanan             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggul banjir</li> <li>• Pintu pengatur banjir</li> <li>• Klep pengatur banjir</li> <li>• Tembok pengaman talud</li> <li>• Krib</li> <li>• Kantung lumpur</li> <li>• Chek-dam</li> <li>• Syphon</li> </ul> </li> <li>- Saluran pengaman             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran banjir</li> <li>• Saluran drainase</li> <li>• Corepure</li> </ul> </li> <li>- Bangunan lainnya             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warning system</li> </ul> </li> <li>- Stasiun</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis	
614	Pengamanan Pantai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggul</li> <li>- Krib</li> <li>- Bangunan lainnya</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis	
615	Air Tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stasiun pompa</li> <li>- Bangunan pembawa</li> <li>- Bangunan pembuang</li> <li>- Bangunan lainnya</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan	Bidang Teknis	

					fingsi dan tugas	
3	620	<p>Jalan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanaman</li> <li>• Bangunan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan sementara</li> <li>• Jembatan sementara</li> <li>• Kantor proyek</li> <li>• Gudang proyek</li> <li>• Barak kerja</li> <li>• Laboratorium lapangan</li> <li>• Rumah</li> </ul> </li> <li>- Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan tanah</li> <li>• Stabilisasi</li> </ul> </li> <li>- Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapis pondasi bawah</li> <li>• Lapis pondasi</li> <li>• Lapis permukaan</li> </ul> </li> <li>- Drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parit tanah</li> <li>• Gorong-gorong</li> </ul> </li> <li>- Buku Trotuir <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Perkerasan</li> <li>• Pasangan</li> </ul> </li> <li>- Median</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanaman</li> <li>• Perkerasan</li> <li>• Pasanagn</li> <li>- Daerah samping <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanaman</li> <li>• Pagar</li> </ul> </li> <li>- Bangunan pelengkap dan pengamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu-rambu / tanda lalu lintas</li> <li>• Lampu penerangan</li> <li>• Lampu pengatur lalu lintas</li> <li>• Patok-patok KM</li> <li>• Patok-patok ROW (Sempadan)</li> <li>• Rel pengamanan</li> <li>• Pagar</li> <li>• Turap, penahan</li> </ul> </li> <li>- Bronjong</li> </ul>				
621	Jalan luar kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanaman</li> <li>• Bangunan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan sementara</li> <li>• Jembatan sementara</li> <li>• Kantor proyek</li> <li>• Gudang proyek</li> <li>• Barak kerja</li> <li>• Laboratorium lapangan</li> <li>• Rumah</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan tanah</li> <li>• Stabilisasi</li> </ul> </li> <li>- Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapis pondasi</li> <li>• Lapis pondasi bawah</li> <li>• Lapis permukaan</li> </ul> </li> <li>- Drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parit</li> <li>• Gorong-gorong</li> <li>• Sub drainase</li> </ul> </li> <li>- Trotoar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Perkerasan</li> </ul> </li> <li>- Median <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanaman</li> <li>• Perkerasan</li> <li>• Pasangan</li> </ul> </li> <li>- Daerah samping <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanaman</li> <li>• Pagar</li> </ul> </li> <li>- Bangunan pelengkap dan pengamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu-rambu / tanda lalu lintas</li> <li>• Lampu penerangan</li> <li>• Lampu pengatur lalu lintas</li> <li>• Patok-patok KM</li> <li>• Patok-patok ROW (Sempadan)</li> <li>• Rel pengamanan</li> <li>• Pagar</li> </ul> </li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turap, penahan</li> </ul>				
	623	<p>Bronjong</p> <p>Jalan layang</p>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
4	630	<p>Jembatan pada jalan kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanaman</li> <li>• Bangunan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan sementara</li> <li>• Jembatan sementara</li> <li>• Kantor proyek</li> <li>• Gudang proyek</li> <li>• Barak kerja</li> <li>• Laboratorium lapangan</li> <li>• Rumah</li> </ul> </li> <li>- Pekerjaan tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Galian tanah</li> <li>• Timbunan tanah</li> </ul> </li> <li>- Pondasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pondasi kepala jalan</li> <li>• Pondasi pilar</li> <li>• Angker</li> </ul> </li> <li>- Bangunan bawah</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala jembatan</li> <li>• Pilar</li> <li>• Piloan</li> <li>• Landasan</li> <li>- Bangunan atas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelagar</li> <li>• Lantai</li> <li>• Perkerasan</li> <li>• Jalan orang /Trotoar</li> <li>• Sandaran</li> <li>• Talang air</li> </ul> </li> <li>- Bangunan /pengamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turap / penahan</li> <li>• Bronjong</li> <li>• Strek dam</li> <li>• Kris dam</li> <li>• Corepure</li> <li>• Krib</li> </ul> </li> <li>- Bangunan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu-rambu / tanda lalu lintas</li> <li>• Lampu penerangan</li> <li>• Lampu pengatur lalu lintas</li> <li>• Patok-patok KM</li> <li>• Patok-patok ROW (Sempadan)</li> <li>• Rel pengamanan</li> <li>• Pagar</li> </ul> </li> <li>- Oprit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan</li> <li>• Perkerasan</li> <li>• Drainase</li> </ul> </li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baku</li> <li>- Median</li> </ul>				
632	Jembatan pada jalan luar kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah penguasaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanaman</li> <li>• Bangunan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan sementara               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan sementara</li> <li>• Jembatan sementara</li> <li>• Kantor proyek</li> <li>• Gudang proyek</li> <li>• Barak kerja</li> <li>• Laboratorium lapangan</li> <li>• Rumah</li> </ul> </li> <li>- Pekerjaan tanah               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Galian tanah</li> <li>• Timbunan tanah</li> </ul> </li> <li>- Pondasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pondasi kepala jalan</li> <li>• Pondasi pilar</li> <li>• Angker</li> </ul> </li> <li>- Bangunan bawah               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala jembatan</li> <li>• Pilar</li> <li>• Piloon</li> <li>• Landasan</li> </ul> </li> <li>- Bangunan atas               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelagar</li> <li>• Lantai</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkerasan</li> <li>• Jalan orang /Trotoar</li> <li>• Sandaran</li> <li>• Talang air</li> <li>- Bangunan /pengamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turap / penahan</li> <li>• Bronjong</li> <li>• Strek dam</li> <li>• Kris dam</li> <li>• Corepure</li> <li>• Krib</li> </ul> </li> <li>- Bangunan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu-rambu / tanda lalu lintas</li> <li>• Lampu penerangan</li> <li>• Lampu pengatur lalu lintas</li> <li>• Patok-patok KM</li> <li>• Patok-patok ROW (Sempadan)</li> <li>• Rel pengamanan</li> <li>• Pagar</li> </ul> </li> <li>- Oprit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan</li> <li>• Perkerasan</li> </ul> </li> <li>• Drainase</li> <li>• Baku</li> <li>- Median</li> </ul>				
5	640	<p>Bangunan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung pengadilan</li> <li>- Rumah Pejabat Negara</li> <li>- Gedung DPR</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung Balaikota</li> <li>- Penjara</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Rumah Dinas</li> </ul>			pelaksanaan fungsi dan tugas	
642		Bangunan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman Kanak-kanak</li> <li>- SD dan Sekolah menengah</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Tempat Kursus / Lembaga pendidikan</li> <li>- Tempat Diklat</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
643		Bangunan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan Olah Raga</li> <li>- Gedung Kesenian</li> <li>- Gedung Pemancar</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
644		Bangunan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept.Store)</li> <li>- Gedung Perdagangan</li> <li>- Bank</li> <li>- Perkantoran</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
645		Bangunan Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum</li> <li>- Gedung Parkir</li> <li>- Rumah Sakit / Puskesmas</li> <li>- Gedung Telkom</li> <li>- Terminal angkutan udara</li> <li>- Terminal Angkutan Air</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal Angkutan Darat</li> <li>- Bangunan Keagamaan</li> <li>- Halte / Shelter</li> </ul>				
646	Bangunan Peninggalan Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monumen</li> <li>- Candi</li> <li>- Keraton</li> <li>- Rumah Tradisional</li> <li>- Heritage</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
647	Bangunan Industri		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
648	Bangunan Tempat Tinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inti /Sederhana</li> <li>• Sedang/Mewah</li> <li>• Rumah Susun</li> </ul> </li> <li>- Rumah Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah contoh</li> </ul> </li> <li>- Real Estate</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
649	Elemen Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pondasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di atas tiang</li> </ul> </li> <li>- Dinding <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahan beban</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menahan beban</li> <li>- Atap</li> <li>- Lantai / Langit-langit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspended</li> <li>• Solit</li> </ul> </li> <li>- Pintu / Jendela <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu Harmonik</li> <li>• Pintu biasa</li> <li>• Pintu sorong</li> <li>• Pintu Kayu</li> <li>• Jendela Sorong</li> </ul> </li> <li>- Jendela Vertikal</li> </ul>			fingsi dan tugas	
650	Tata Kota Daerah Perdagangan /Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah Pusat Perbelanjaan</li> <li>- Daerah Perkotaan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
651	Daerah Pemerintah		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
653	Daerah Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepadatan rendah</li> <li>- Kepadatan tinggi</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan	Bidang Teknis

					fingsi dan tugas	
654	Daerah Industri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri berat</li> <li>- Industri ringan</li> <li>- Industri rumah</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis	
655	Daerah Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman kota</li> <li>- Tempat olah raga dan bermain</li> <li>- Ruang terbuka</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis	
656	Tranportasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan</li> <li>- Jaringan kereta api</li> <li>- Jaringan sungai</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis	
657	Assainering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pengumpulan</li> <li>- Intalasi pengolahan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan</li> <li>• Unit Desinfektan</li> </ul> </li> <li>- Unit pengompaan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis	
658	Kesehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persampahan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan pengumpul</li> <li>• Bangunan Pemusnahan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengotoran Udara</li> <li>- Pengotoran Air <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air buangan Industri</li> </ul> </li> <li>- Kegaduhan/ polusi suara</li> <li>- Kebersihan Kota</li> </ul>			dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	
7	660	Tata Lingkunagan Derah Hutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mrngganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan fungsi dan tugas	
	665	Transportasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan</li> <li>- Jaringan Kereta Api</li> <li>- Jaringan sungai</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	670	Ketenmagaan Listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelistrikan             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelistrikan PLN</li> <li>• Kelistrikan non PLN</li> </ul> </li> <li>- Pembangkit tenaga listrik             <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)</li> <li>• PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)</li> <li>• PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)</li> <li>• PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)</li> <li>• PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)</li> <li>• PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)</li> <li>• PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)</li> </ul> </li> <li>- Tranmisi tenaga listrik             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardu induk/gardu penghubung/gardu trafo</li> <li>• Saluran udara tegangan tinggi</li> <li>• Kabel bawah tanah</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribusi tenaga listrik             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardu distribusi</li> <li>• Tegangan rendah</li> <li>• Tegangan menengah</li> <li>• Jaringan bawah tanah</li> </ul> </li> <li>- Pengusahaan listrik             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambungan listrik</li> <li>• Penjualan tenaga listrik</li> </ul> </li> <li>- Tarif Listrik</li> </ul>				
672	Tenaga Air		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
673	Tenaga Minyak		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
674	Tenaga Matahari		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
675	Tenaga Uap		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					dapat mrngganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	
	676	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
9	680	Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
10	690	Air Minum Intake <ul style="list-style-type: none"> <li>- Broncaptering</li> <li>- Sumur</li> <li>- Bendungan</li> <li>- Saringan</li> <li>- Pintu Air</li> <li>- Saluran pembawa</li> <li>- Alat ukur</li> <li>- Perpompaan</li> <li>-</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fingsi dan tugas	Bidang Teknis
	692	Tranmisi Air Baku <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpipaian</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Katup Udara</li> <li>- Katup Penguras</li> <li>- Bak Pelepas tekanan</li> <li>- Jembatan pipa</li> <li>- Syphon</li> </ul>			dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	
693	Instalasi Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan ukur</li> <li>- Bangunan Aerasi</li> <li>- Bangunan Pengendapan</li> <li>- Bangunan Pembubuh bahan kimia</li> <li>- Bangunan pengaduk</li> <li>- Bangunan saringan</li> <li>- Perpompaan</li> <li>- Clear Hell</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran VIII Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 700 Bidang Tugas Pengawasan

<b>VIII. PENGAWASAN</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>		PENGAWASAN				
	700	Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	701	Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	703	Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	704	Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan / Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	705	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	707	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	708	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	709	Bidang Perjalanan Dinas	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
<b>2</b>	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	711	Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	712	Bidang Pemerintahan Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	713	Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	714	Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	715	Bidang MPR / DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	716	Bidang DPRD Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	717	Bidang DPRD Kabupaten / Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	718	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	719	Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
<b>3</b>	720	BIDANG POLITIK				
	721	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	724	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	726	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	727	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	731	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	732	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	733	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	734	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	735	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

					perangkat daerah/unit kerja	
	736	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	737	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	740	BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang Teknis

					fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	741	Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	742	Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	743	Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	744	Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	745	Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	746	Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki	Bidang Teknis

					dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	747	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	748	Bidang Media Masa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

6	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	751	Bidang Perdagangan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	753	Bidang Perindustrian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	754	Bidang Pertambangan /Kesamudraan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	755	Bidang Perhubungan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah/unit kerja	
	756	Bidang Tenaga Kerja	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	757	Bidang Permodalan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	758	Bidang Tentang Perbankan / Moneter	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	759	Bidang Tentang Agraria	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
<b>7</b>	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	761	Bidang Pengairan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
762	Bidang Jalan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
763	Bidang Jembatan		Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

764	Bidang Bangunan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
765	Bidang Tata Kota	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
766	Bidang Lingkungan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

					daerah/unit kerja	
	767	Bidang Ketenagaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	768	Bidang Peralatan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	769	Bidang Air Minum	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah/unit kerja	
<b>8</b>	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	Bidang Pengadaan Kepegawaian	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	782	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	783	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang Teknis

					fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	785	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	786	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
788	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
789	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis	

					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
<b>9</b>	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	792	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	793	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	794	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	795	Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	797	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran IX Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 800 Bidang Tugas Kepegawaian

<b>IX. KEPEGAWAIAN</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	800	KEPEGAWAIAN				
	801	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD,diserti : 1) Analisa jabatan 2) Beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi Kepada Men PAN dan BKN c. Psetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi PNS e. Penetapan Formasi Khusus	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	802	Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Berkas lamaran yang tidak diterima</li> <li>d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Lamaran</li> <li>2) Ijazah</li> <li>3) Kartu Kuning</li> <li>4) Surat Keterangan Kesehatan</li> </ul> </li> <li>e. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun</li> <li>f. SK CPNS / PNS Kolektif</li> </ul>			daerah/unit kerja	
803	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Karir Pegawai               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diklat / Kursus / Magang / Tugas Belajar / Ujian Dinas / Ijin Belajar Pegawai :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin</li> <li>2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri</li> </ul> </li> <li>b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Sertifikat</li> <li>c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)/Standar Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit</li> <li>e. Disiplin Pegawai</li> <li>f. Berkas Hukuman Disiplin</li> <li>g. Penghargaan dan Tanda Jasa</li> </ul> </li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
804	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mutasi Pegawai               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar perwakilan, dan Mutasi Antar Unit Kerja</li> <li>b. Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN</li> <li>c. Mutasi Keluarga</li> </ul> </li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Izin Pernikahan / Perceraian</li> <li>2) Surat penolakan Izin Pernikahan / Perceraian</li> <li>3) Surat Nikah / Cerai</li> <li>4) Akte Kelahiran Anak</li> <li>5) Surat Keterangan Adopsi Anak</li> <li>6) Surat Keterangan Meninggal Dunia</li> </ol> <p>d. Usul Kenaikan Pangkat / golongan / jabatan</p> <p>e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural / Fungsional</p> <p>f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai</p> <p>g. Peninjauan Masa Kerja</p> <p>h. Berkas Baperjakat</p>			daerah/unit kerja	
805	<p>Administrasi Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Perintah Dinas / Tugas</li> <li>b. Cuti Besar</li> <li>c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin</li> <li>d. Cuti Alasan Penting</li> <li>e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)</li> <li>f. Dokumentasi Identitas Pegawai <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usul Penetapan kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami</li> <li>2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan</li> <li>3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)</li> <li>4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)</li> </ol> </li> </ol>	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	

		g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kependudukan (DUK) h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala				
806	Kesejahteraan Pegawai	a. Berkas tentang layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/Askes c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena dinas g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olah Raga dan Rekreasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
807	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
808	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
809	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
810	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil : a. Berkas lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan PNS g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari jabatan Struktur/Fungsional</li> <li>k. SK Perpindahan Wilayah Kerja</li> <li>l. SK Perpindahan Antar Instansi</li> <li>m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)</li> <li>n. Berta Acara Pemeriksaan</li> <li>o. SK Hukum Jabatan/Hukum Disiplin PNS</li> <li>p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk</li> <li>q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan</li> <li>r. SK Pemberian Uang Tunggu</li> <li>s. SK Pembebasan dari jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara</li> <li>t. SK Pengalihan PNS</li> <li>u. SK Pemberhentian sebagai PNS</li> <li>v. SK Pemberhentian Sementara</li> <li>w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang</li> <li>x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang</li> <li>y. SK Penggantian Nama</li> <li>z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</li> <li>aa. Surat Nikah/Cerai</li> <li>bb. Akta Kelahiran</li> <li>cc. Isian Formulir PUPNS</li> <li>dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan jabatan</li> <li>ee. Surat Permohonan menjadi Anggota Parpol</li> <li>ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga</li> <li>gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--

		hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas Izin Belajar Dalam / Luar Negeri mm. Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri nn. Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan / Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status PNS ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari jabatan Organik karena dicalonkan Sebagai Kepala / Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun				
811	Berkas Perseorangan Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
812	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis	

		b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi lainnya			mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	813	Berkas Perseorangan Kepala Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Lampiran X Peraturan Bupati Muara Enim  
 Nomor 22 Tahun 2019  
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan  
 Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Muara Enim

Kode Angka 900 Bidang Tugas Keuangan

<b>X. KEUANGAN</b>						
<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Arsip</b>	<b>Klasifikasi Keamanan</b>	<b>Hak Akses</b>	<b>Dasar Pertimbangan</b>	<b>Unit Pengolah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	900	KEUANGAN				
<b>1</b>	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar Nota Keuangan APBD perubahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang

903	APBD, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
904	Dana Alokasi Umum - Berkas pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
905	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan - Dana Bagi Hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
906	Dana Cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Sekretariat, Bidang

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>2</b>	910	ANGGARAN				Sekretariat, Bidang
	911	Rutin / Murni - APBD murni mulai dari perencanaan - Program di DPRD sampai penetapan perda APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	912	Pembangunan / Kegiatan - Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan - Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Sekretariat, Bidang

		- Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD			pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
914	Daftar isian Kegiatan (DIK) / Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Usulan Kegiatan</li> <li>- Pengusulan Pra RKA</li> <li>- Pengusulan RKA</li> <li>- Pembahasan</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
915	Daftar Isian Proyek (DIP) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Usulan Proyek (DUP)</li> <li>- Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
916	Revisi Anggaran / Penyempurnaan APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan Realisasi APBD</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
917	Pembiayaan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

					perangkat daerah/unit kerja	
	918	Belanja Langsung / Tidak Langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>3</b>	920	OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)				Sekretariat, Bidang
	921	Rutin / Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	Pembangunan / Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

					perangkat daerah/unit kerja	
	924	Ralat SKO / Revisi Surat PEnyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>4</b>	930	VERIFIKASI				Sekretariat, Bidang
	931	SPM Rutin (Daftar P8) / SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	932	SPM Pembangunan (Daftar P8) / SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	933	Penerimaan (Daftar P6. P7 ) / Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

					perangkat daerah/unit kerja	
	934	SPJ Rutin / SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	935	SPJ Pembangunan / SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang

<b>5</b>	940	PEMBUKUAN				Sekretariat, Bidang
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) - Neraca - Catatan Anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>6</b>	950	PERBENDAHARAAN				Sekretaris, Bidang
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74) /Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang



					perangkat daerah/unit kerja	
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	953	Penghapusan Kekayaan Negara - Aset Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset Bergerak</li> <li>• Aset Tidak Bergerak</li> <li>• Aset Tidak Berwujud</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	954	Pengangkatan/Pergantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang

	956	Surat Tagihan Piutang. Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	957	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>7</b>	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				Sekretariat, Bidang
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang

	963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan Keuangan Bulanan - Laporan Keuangan Tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>8</b>	970	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	972	Subsidi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang	Sekretariat, Bidang

					dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
974	Retribusi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
975	Bea		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
976	Cukai		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang

	977	Pungutan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara / Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>9</b>	980	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang
<b>10</b>	990	BENDAHARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Sekretariat, Bidang

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	991	SKKP / SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Sekretariat, Bidang

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI